

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Organisasi : **Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB**
2. Tugas : Membantu Asisten Administrasi Umum dalam merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana;
3. Fungsi :
  - a. Perumusan bahan/ materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Organisasi;
  - b. Perumusan penyusunan rencana/ program kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Organisasi;
  - c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif, pembinaan, serta pelaporan di bidang Organisasi;
  - d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi data jabatan perangkat daerah provinsi, UPTD/B, UPT Pusat serta Perangkat;

### 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Alasan)
1	<b>Mewujudkan Perangkat Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</b>	Persentase Peta Proses Bisnis PD yang sesuai perundang-undangan	Formulasi Pengukuran : Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyusun peta proses bisnis sesuai ketentuan dibagi Perangkat Daerah dikali 100 Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Bagian Tata Laksana Alasan : Mengetahui tata kerja Perangkat Daerah Provinsi NTB
2		Persentase Perangkat Daerah yang disederhanakan Struktur Organisasi	Formulasi Pengukuran : Jumlah Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang disederhanakan dibagi Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan Kemenpan RB dikali 100 Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Bagian Kelembagaan dan Anjab Alasan : Mengetahui Persentase Perangkat Daerah yang sudah menindaklanjuti Penyederhanaan struktur organisasinya sesuai Peraturan Perundang-undangan
3		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP BB, A	Formulasi Pengukuran : Nilai Sakip sesuai dengan Evaluasi Kemenpan RB Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Kemenpan RB Alasan : Formulasi hasil penilaian Kemenpan RB;

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Alasan)
4		Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh nilai SAKIP BB	Formulasi Pengukuran : Nilai Sakip sesuai dengan Evaluasi Kemenpan RB Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Kemenpan RB Alasan : Formulasi hasil penilaian Kemenpan RB;
5		Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi standar pelayanan publik	Formulasi Pengukuran : Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi standar pelayanan publik sesuai dengan Evaluasi Kemenpan RB Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Kemenpan RB Alasan : Formulasi hasil penilaian Kemenpan RB;
6		Persentase perangkat daerah yang menerapkan PMPRB	Formulasi Pengukuran : Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan PMPRB sesuai dengan Evaluasi Kemenpan RB Tipe Perhitungan : Tahunan Sumber Data : Kemenpan RB Alasan : Formulasi hasil penilaian Kemenpan RB;

Mataram, Januari 2023

KEPALA BIRO ORGANISASI  
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



**Dr. NURSALIM, S. Sos, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19731231 199402 1 009